



LAUNCHING—Bawaslu Kabupaten Agam launching Posko Kawal Hak Pilih di Kantor Bawaslu setempat di Jl. Sutan Syahrir Lubuk Basung, Rabu (26/6). (mursyidi)

BAHAS PENGAWASAN BUMD

DPRD Sumbar Terima Kunjungan DPRD Pasbar

Padang, Singgalang

Berkonsultasi tentang pengoptimalan fungsi pengawasan terhadap BUMD, Komisi II DPRD Pasaman Barat studi komparatif ke DPRD Sumbar, Rabu (26/6).

Kedatangan mereka disambut Kepala Bagian (Kabag) Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Provinsi Sumatera Barat, Zardi Syahrir didampingi Kasubag Protokol dan Kehumasan, Darul Idris. Ketua Komisi II DPRD Pasaman Barat, Erianto menyebutkan, keberadaan BUMD bertujuan untuk memberikan kontribusi positif terhadap daerah dan menumbuhkan perekonomian masyarakat Pasaman Barat. Selain berkontribusi terhadap PAD, juga dapat membuka lapangan usaha.

"Kita mendorong pemerintah setempat meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) dari BUMD agar pembangunan dapat ditingkatkan," kata Erianto.

Namun demikian,

lanjutnya, masih ada BUMD yang belum maksimal memberikan kontribusi terhadap pendapatan daerah. Perusahaan Daerah Air Minum atau PDAM setempat misalnya, telah berjalan sesuai yang diharapkan, namun belum memberikan kontribusi terhadap peningkatan PAD.

"Untuk itu, kami berkunjung ke DPRD Sumbar untuk mendapatkan pencerahan agar fungsi pengawasan terhadap BUMD dapat lebih maksimal," ujar Erianto.

Sementara itu, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Sumatera Barat, Zardi mengatakan, pihaknya mengapresiasi kedatangan pimpinan dan anggota Komisi II DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Studi komparatif tersebut dinilai sangat penting selain mempererat silaturahmi sekaligus bertukar informasi tentang pembangunan.

"Kita ucapkan terima kasih dan apresiasi

terhadap rombongan komisi II DPRD Pasaman Barat telah berkunjung ke DPRD Sumbar. Kita akan selalu terbuka akan informasi yang bermanfaat untuk masyarakat," ujar Zardi.

Ia mengatakan, perihal pengawasan BUMD selalu dilakukan DPRD secara kelembagaan. Namun leading sektor pengawasan terdapat di Komisi III bidang keuangan.

Pengawasan terhadap BUMD selalu masuk dalam semua rapat kerja dengan organisasi perangkat Daerah (OPD) terkait.

Selain juga masuk dalam evaluasi terkait pembahasan pertanggungjawaban APBD, penyusunan APBD dan rapat kerja lainnya.

"Sama seperti Pasaman Barat, DPRD Sumbar juga menekankan tentang pentingnya mengoptimalkan sumbangsih BUMD terhadap pendapatan daerah sehingga semakin banyak kegiatan pembangunan yang bisa didanai," katanya. (401)

BUKA POSKO KAWAL HAK PEMILIH

Awasi Coklit Data Pemilihan Pilkada

AGAM - SINGGALANG

Bawaslu Kabupaten Agam launching Posko Kawal Hak Pilih di Kantor Bawaslu setempat di Jl. Sutan Syahrir, Lubuk Basung. Ini merupakan rangkaian dari kegiatan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih yang diinstruksikan oleh Bawaslu Republik Indonesia dalam rangka melaksanakan tugas pengawasan tahapan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan 2024.

Launching posko ini sejalan dengan tahapan pemilihan yang sedang berjalan yaitu Penyusunan dan Pemutakhiran Data Pemilih. Memasuki hari ketiga pencocokan dan penelitian (Coklit) Bawaslu Agam melakukan pemantauan terhadap proses coklit yang dilau-

kukan oleh Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih) Pilkada 2024.

Ketua Bawaslu Agam, Suhendra, Rabu (26/6), menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk mensosialisasikan kepada masyarakat mengenai kesadaran akan status hak pilihnya mulai dari tahapan coklit.

"Posko Kawal Hak Pilih telah dibuka di Kantor Bawaslu Kabupaten Agam dan juga di kantor Panwas Kecamatan se-Kabupaten Agam," katanya.

Laporkan ke Bawaslu atau ke pengawas pemilihan terdekat jika terdapat ketidaksesuaian prosedur yang dilakukan Pantarlih selama tahapan Coklit berlangsung.

Selain melalui pembukaan Posko Kawal Hak Pilih, pihaknya juga melakukan kunjungan ke masyarakat dan koordinasi kepada stakeholder data terhadap masyarakat yang ren-

tan dalam kerawanan hak pilih seperti pemilih disabilitas, pemilih yang meninggal dunia atau alih status, dan pemilih yang berada di lokasi khusus.

Pada kesempatan yang sama, Kordiv Pencegahan, Parmas dan Humas Bawaslu Agam, Yuhendra menyampaikan, metode pengawasan yang dilakukan adalah pengawasan secara langsung serta melalui koordinasi stakeholder data. Pengawasan langsung dilakukan dengan cara pengawasan melekat kepada Pantarlih dan melalui uji petik.

Coklit dilaksanakan pada 24 Juni hingga 24 Juli 2024. Hingga hari kedua, Bawaslu Agam telah melakukan inventarisir hasil pengawasan. Beberapa fokus pengawasan melekat yaitu terhadap prosedur Coklit oleh Pantarlih di antaranya potensi adanya Pantarlih yang tidak mencoklit secara langsung, Pantarlih yang melimpahkan tugasnya ke-

pada orang lain, Pantarlih yang tidak memiliki SK, Pantarlih yang terbukti sebagai anggota partai politik, KK yang sudah dicoklit tetapi tidak ditempel stiker, dan KK yang belum dicoklit tetapi ditempel stiker.

"Kami juga meminta PKD untuk mencatat kejadian khusus yang ditemukan pada saat proses Coklit. Dalam rekapitulasi hasil pengawasan hingga hari kedua, tidak ditemukan permasalahan yang termasuk kedalam fokus pengawasan Bawaslu," katanya.

Namun, berdasarkan laporan PKD Nagari Paninjauan terdapat data pemilih yang keluar di TPS lain. Hal ini disebabkan oleh kondisi geografis di nagari tersebut yang cukup rumit. Kendala tersebut telah diselesaikan oleh PPS dan Pantarlih setempat.

Bawaslu Kabupaten Agam akan terus mengawasi proses Coklit ini hingga 28 hari ke depan. (210)

SUZUKI YOUR GEAR

RAJANYA PICK-UP!

RASAKAN HEMATNYA EFISIENSI EKSPEDISI BISNIS ANDA

DP & Angsuran Terjangkau | Tenor Kredit s.d. 5 Tahun

SCAN DISINI Untuk info Lebih Lanjut

NEW CARRY

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PAYAKUMBUH
Jalan Jend. Sudirman No 17 (Gedung Rocky Plaza Ramayana) Kota Payakumbuh - Provinsi Sumatera Barat - Indonesia
Telp. (0752) 92556, 92128, 95812

PENGUMUMAN KEDUA LELANG EKSEKUSI HAK TANGGUNGAN

Berdasarkan pasal 6 UUHT No. 4 tahun 1996, PT. BRI Cabang Payakumbuh selaku pemegang Hak Tanggungan peringkat pertama akan melaksanakan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Bukittinggi terhadap debitur:

DWID FERY ANDRIO, dengan aset/jaminan sebagai berikut:

- Sebidang tanah dan bangunan beserta suratnya sesuai SHM No. 477 seluas 218 MP atas nama YOLIA FITRI Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat
Nilai Limit : Rp. 1.002.800.000,-
Uang Jaminan : Rp. 340.000.000,-
- Sebidang tanah dan bangunan beserta suratnya sesuai SHM No. 506 seluas 199 MP atas nama DWID FERY ANDRIO dan YOLIA FITRI Nagari Simalanggang, Kec. Payakumbuh, Kabupaten Lima Puluh Kota Propinsi Sumatera Barat
Nilai Limit : Rp. 848.500.000,-
Uang Jaminan : Rp. 289.000.000,-

Syarat-syarat Lelang:

- Cara Penawaran:
Lelang dilaksanakan dengan penawaran secara tertulis tanpa kehadiran peserta lelang melalui Aplikasi Portal Lelang Indonesia (Open Bidding) yang dapat diakses pada alamat domain <https://portal.lelang.go.id> dan/ atau <https://lelang.go.id>. Tawaran melalui lelang elektronik dapat dilihat pada menu "Syarat & ketentuan" pada domain tersebut.
- Pendaftaran:
Calon Peserta Lelang mendaftarkan diri dan mengaktifkan akun pada <https://portal.lelang.go.id> dan/ atau <https://lelang.go.id> dengan mengisi serta mengunggah softcopy KTP, NPWP, dan nomor rekening atas nama sendiri (uang jaminan akan dibebaskan langsung ke nomor rekening).
- Waktu Pelaksanaan:
a. Penawaran lelang diajukan melalui alamat domain diatas pada:
Hari : Kamis
Tanggal : 11 Juli 2024
Waktu Penawaran : Sejak tayang pada aplikasi lelang s.d. batas akhir penawaran
Batas Akhir Waktu Penawaran : 11 Juli 2024 Pukul 14.30 (sesuai waktu server)
Alamat Domain : portal.lelang.go.id dan/ atau lelang.go.id
Tempat Lelang : BRI Cabang Payakumbuh Jalan Jendral Sudirman No 17 (Gedung Rocky Plaza Ramayana) Kota Payakumbuh, Sumatera Barat
Penetapan Penawaran : Setelah batas akhir penawaran.
b. Peserta lelang diwajibkan menyesuaikan diri dengan penggunaan waktu server yang tertera pada alamat domain tersebut diatas.
- Uang Jaminan Lelang:
a. Peserta lelang diwajibkan menyetor uang jaminan lelang seperti tersebut di atas dengan ketentuan sebagai berikut:
- Jumlah nominal yang dibetorkan harus sama dengan uang jaminan yang dinyatakan tertera dalam pengumuman lelang ini, dibetorkan sekaligus (bukan dicicil).
- Saluran uang jaminan lelang HARUS sudah aktif ditrima oleh KPKNL selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum pelaksanaan lelang.
b. Uang Jaminan lelang dibetorkan ke nomor Virtual Account (VA) masing-masing peserta lelang. Nomor VA akan dibagikan secara otomatis dari alamat domain di atas kepada masing-masing peserta lelang setelah berhasil melakukan pendaftaran dan data identitas diupload ke sistem.
c. Penawaran Lelang:
a. Penawaran harga bisa dilakukan setelah calon peserta lelang di validasi oleh Pejabat Lelang setelah peserta lelang menyetor uang jaminan lelang.
b. Penawaran lelang paling sedikit sama dengan nilai limit.
- Pelaksanaan Lelang:
a. Pemering Lelang akan diumumkan di email masing-masing peserta.
b. Pemering lelang harus mematuhi harga pembelian dan bisa lelang sebesar 2% dari harga lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak pelaksanaan lelang. Apabila terpasang atau tidak mematuhi kewajiban pembayaran sesuai ketentuan diatas, maka uang jaminan akan dibetorkan ke Kas Negara.
c. Pemering diwajibkan membayar SPHTB dan pajak pertanggungjawaban biaya lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
d. Objek lelang dalam kondisi apa adanya dan dapat dilihat pada alamat di atas mulai hari ini sampai sebelum pelaksanaan lelang.
e. Objek lelang dalam kondisi apa adanya, apabila ada gugatan, tuntutan atau kewajiban yang terungkap (termasuk namun tidak terbatas pada tanggungan PBB, rekening bank, telepon, PAM, dll) menjadi tanggungjawab pembeli.
f. Calon peserta lelang (pemering lelang) dianggap sudah mengetahui kondisi objek yang di lelang.
g. Segala biaya yang timbul akibat mekanisme perbankan menjadi beban peserta lelang.
h. Pemering lelang bertanggung jawab atas segala biaya biaya yang timbul dikemudian hari.
i. Pengumuman Objek Lelang setelah pelaksanaan lelang menjadi tanggung jawab pemering lelang.
- Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, Kantor Cabang Payakumbuh, Telp. (0752) 92556, CP - Hany (0813 6320 1171) Dan (0812 7787 6070), atau KPKNL Bukittinggi, Jalan Muhammad Yamin Nomor 60, Bukittinggi Telp. (0752) 34899.

Payakumbuh, 27 Juni 2024
PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk
KANTOR CABANG PAYAKUMBUH
TJ

RIANDI RINALDI TABRANI
Pemimpin Cabang

BUMN UNTUK INDONESIA | **BRI**

Kami Hadir Melayani Anda Semakin Dekat

Mulai tanggal 1 Juli 2024, layanan Kantor Teras BRI Pasar Lubuk Buaya akan dilakukan pengalihan, Nasabah dapat melakukan transaksi di BRI terdekat.

Unit Kerja BRI Lubuk Buaya
Jl. Adinegoro Lubuk Buaya,
Kota Tangah Kota Padang

Unit Kerja BRI Tabang
Jl. Prof. Dr. Hamka, Parupuk Tabang
Kota Tangah, Padang

Untuk Informasi Lebih Lanjut Hubungi Call Center Bri 1500017

Download **BRI mo** Untuk Melayani Anda Lebih Dekat

www.bri.co.id
BRI merupakan peserta perantara LPS & bank dan domes di Charter Jasa Keuangan



PENYERAHAN BANTUAN BENIH DAN PAKAN IKAN POKIR KETUA DPRD SUMBAR

Budidaya Ikan Bisa Menjadi Ujung Tombak Ketahanan Ekonomi Keluarga

PAYAKUMBUH - SINGGALANG

Kelurahan Koto Panjang, Payakumbuh Timur bisa mendapatkan label sebagai kawasan industri ikan. Ini mengingat potensi produksi ikan di daerah itu sebenarnya sangat besar, sehingga mesti dioptimalkan pembudidayaannya.

Hal tersebut disampaikan Ketua DPRD Sumbar, Supardi saat acara penyerahan bantuan benih dan pakan ikan lele kepada tiga kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan) 18 Juni lalu di Koto Panjang, Payakumbuh Timur.

Pendistribusian bantuan benih dan pakan ikan lele itu dilaksanakan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Sumbar menggunakan dana pokok pikiran (pokir) Ketua DPRD Sumbar, Supardi.

Supardi mengatakan, ia berharap bantuan benih dan ikan tersebut dapat memicu masyarakat untuk memaksimalkan produksi dan pembudidayaan ikan.

"Saya juga berharap kegiatan produksi ikan bisa menjadi salah satu ujung tombak perekonomian keluarga," katanya.



tanya. Ia mengatakan, potensi ikan di Koto Panjang ini sangat besar. Bahkan kualitas ikannya tak kalah dari daerah yang sudah ternama sebagai sentra produksi ikan.

"Potensi ini tak boleh dibiarkan. Koto Panjang bisa saja menerima label sebagai kawasan industri ikan," ujar Supardi.

Bukan hanya untuk Koto Panjang, Supardi mengatakan untuk mengoptimalkan produksi dan budidaya perikanan di Sumbar maka harus ada blueprint perencanaan dan pelaksanaannya.

"Hal ini dikarenakan produksi dan budidaya tersebut tak cukup hanya dilaksanakan dalam satu periode pemerintahan," paparnya.

Selain itu, perlu ada koordinasi antar organisasi perangkat Daerah (OPD) dalam upaya pengoptimalannya. Sehingga proses bisa terlaksana dari hulu ke hilir. Dengan begitu hasilnya akan maksimal.

"Penyerahan bantuan benih dan pakan ini merupakan hulu, nah hilirnya juga harus diperhatikan pemerintah," katanya.

Namun Supardi juga berharap Pokdakan dan masyarakat bisa lebih aktif dan mandiri dalam mengupayakan produksi dan budidaya ini dari hulu dan hilir. Jangan selalu berharap bantuan pemerintah, sehingga dengan begitu Pokdakan akan bisa maju dan berkembang.

Sekretaris DKP Sumbar, Resi Suarti mengatakan kegiatan ini bernama pengadaan benih dan pakan ikan lele/kegiatan pengadaan ikan lele pada sentra produksi.

"Pada hari ini kami mendistribusikan bantuan benih dan pakan ikan lele berdasarkan pokir Ketua DPRD Sumbar, Pak Supardi," ujarnya.

Ia mengatakan ada tiga Pokdakan yang menerima bantuan benih dan pakan tersebut, ketiga berada di kawasan Koto Panjang, Payakumbuh Timur, yakni Pokdakan Lubuk Basamo, Pokdakan Bakapusun Jaya dan Pokdakan Harapan se-

jahtera. Total ada lebih dari 100 ribu ekor benih lele yang diserahkan. Masing-masing Pokdakan mendapatkan sekitar 33.600 ekor benih lele.

Kemudian ada diserahkan sebanyak sekitar 400 kilogram pakan benih yang diterima Pokdakan masing-masing 140 kilogram.

"Diserahkan juga sebanyak 4.546 kilogram pakan biasa. Masing-masing Pokdakan menerima berkisar 1.500 kilogram lebih," ujarnya.

Resi Suarti mengatakan kegiatan ini bertujuan untuk meningkatkan produksi perikanan budidaya, khususnya budidaya ikan lele.

Agar program kegiatan ini bisa mencapai tujuan yang diharapkan, ia mengatakan penerima bantuan benih dan pakan lele tersebut dipastikan merupakan yang layak dibantu. Ada sejumlah persyaratan teknis yang mesti dipenuhi Pokdakan.

"Terutama pula tiga Pokdakan ini bukan merupakan Pokdakan dadakan, namun memang sudah ada dan berproduksi sejak lama," ujarnya.

Ketua DPRD Sumbar, Supardi berharap pemberian bantuan benih dan pakan ikan lele ini bisa memacu semangat Pokdakan dan anggota dalam meningkatkan produksi ikan

lele. "Terutama sekali semoga bantuan ini bisa membantu peningkatan ekonomi anggota Pokdakan," ujar Supardi. Ia berharap usaha perikanan masyarakat ini bisa menjadi ujung tombak.

Sementara itu, Lurah Koto Panjang Titi Fanny Gusti mengatakan memang upaya mandiri telah dipupuk Pokdakan di Koto Panjang, bahkan dalam membentuk kolam mereka melaksanakan swadaya. Mereka juga selalu berupaya untuk tak selalu berharap pada bantuan pemerintah, melainkan mengupayakan sendiri.

"Namun bagaimana pun bantuan yang diberikan DKP dengan dana pokir pak Supardi sangat berarti bagi Pokda-

kan. Apalagi Pokdakan-pokdakan ini memang memiliki rencana pengembangan lanjutan," katanya.

Nantinya pokdakan-pokdakan ini akan menjadikan produksi ikan lele yang bukan hanya sebatas pengembangan benih saja, namun juga menjual ikan lele ke berbagai daerah.

Selain itu, juga akan dikembangkan produksi ikan asap yang akan memberdayakan para ibu-ibu Koto Panjang.

Mewakili masyarakat, lurah koto panjang mengucapkan terima kasih pada Supardi dan DKP yang telah menyerahkan bantuan pada tiga Pokdakan di Koto Panjang.

"Pokdakan dan masyarakat sangat terbantu dengan bantuan ini," ujarnya. (*)



SERBANEKA

Percepatan Implementasi Wisata Halal Butuh Dukungan Semua Pihak

PADANG - SINGGALANG

Pemerintah Provinsi Sumatera Barat kembali menunjukkan komitmennya dalam pengembangan pariwisata halal. Dengan wisata halal itu diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

"Dengan penetapan Sumbar sebagai prioritas pengembangan pariwisata ramah muslim, maka Pemprov Sumbar secara resmi mengarahkan pengembangan pariwisata muslim dan Pemprov Sumbar menerbitkan peraturan nomor tahun 2020 tentang pariwisata halal," sebut Gubernur Sumbar diwakili Asisten II Setdaprov Sumbar, Arry Yuswandi, Rabu (26/6).

Hal itu disampaikan pada rapat koordinasi percepatan implementasi pengembangan pariwisata halal dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (26/6).

Hadir pada kesempatan itu dinas dan badan di lingkungan Pemprov Sumbar serta badan dan dinas kabupaten/kota.

Disampaikan, Sumbar ditetapkan menjadi salah satu destinasi wisata ramah muslim atau halal di Indonesia. Pene-tapan itu diberikan oleh Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif pada 2019 bersama sembilan destinasi lainnya.

Penetapan tersebut mempertimbangkan potensi sumber daya pariwisata di Sumbar, seperti alam, budaya dan bua-tan.

Kondisi itu juga didukung oleh kondisi demografi dan budaya masyarakat Minang-



PAPARAN - Gubernur Sumbar diwakili Asisten II Setdaprov, Arry Yuswandi saat menyampaikan paparan tentang percepatan implementasi pengembangan pariwisata halal di Auditorium Gubernur Sumbar, Rabu (26/6).

kabau sebagai masyarakat adat yang mempunyai unsur keislaman yang kokoh.

"Dengan filosofi Sumbar, adat basandi syarak, syarak basandi kitabullah menjadi Sumbar itu sangat berpotensi menjadi destinasi wisata halal," sebutnya.

Dijelaskannya, menjadikan Sumbar wisata halal, bukan berarti mengasingkan wisatawan yang berkunjung ke Sumbar dengan muslim dan non muslim. Namun, memberikan kepastian dan kenyamanan bagi wisatawan muslim dalam melakukan aktivitas dalam kaidah Islam.

Sementara, tren pariwisata belakangan mengalami banyak perubahan. Tingginya pertumbuhan jumlah wisatawan muslim.

Meningkatnya presentase wisatawan milenial. Dengan semakin tinggi pula prioritas wisatawan terhadap keber-

sihan, kesehatan dan keselamatan.

Secara umum implementasi pariwisata ramah muslim di Sumbar telah berjalan cukup baik. Di mana, rantai nilai telah terbentuk dengan dukungan regulasi, atribut destinasi, adaptasi program dari pemerintah pusat dan daerah juga sudah selaras.

Hanya saja, perlu perbaikan yang signifikan. Diantaranya, dukungan partisipasi masyarakat, sinergi dan integrasi antar pemangku kepentingan. Kegiatan acara ramah muslim masih terpusat di kota-kota tertentu.

"Peraturan daerah penyelenggaraan pariwisata halal ini tidak hanya berlaku untuk wisatawan muslim, tapi juga bagi wisatawan lainnya yang menginginkan pengalaman wisata yang sesuai dengan prinsip-prinsip kehalalan," ujarnya.

Untuk itu, diharapkan pemerintah kabupaten dan kota melakukan sinkronisasi kebijakan-kebijakan dan kegiatan untuk mendukung wisata halal. Seperti, pendirian rumah potong hewan, sertifikasi halal bagi UMKM, sarana dan prasarana pendukung yang ramah muslim.

Kepala Biro Kesejahteraan Masyarakat (Kesra) Setdaprov Sumbar Al Amin mengatakan, rapat tersebut bertujuan mendorong penyelenggaraan wisata halal yang dapat menggerakkan perekonomian masyarakat. Sehingga, memberikan multiplier efek untuk kesejahteraan masyarakat.

"Kita berharap rapat ini akan menghasilkan kesepakatan dan didukung oleh pemerintah kabupaten dan kota. Termasuk partisipasi masyarakat, sinergi dan integrasi antar pemangku kepentingan," harapnya. (104)

DI SUMATERA BARAT

Peluang Investasi Peternakan Menjanjikan

PADANG - Sumatera Barat memiliki peluang investasi di sektor peternakan yang cukup menjanjikan. Namun kondisinya belum tergarap secara maksimal dan perlu dicari solusi yang terbaik.

Hal itu terungkap dalam kegiatan workshop peluang investasi sektor peternakan yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbar, Selasa (25/6).

Kepala DPKH Sumbar, Sukarli melalui Kabid Bina Usaha dan Kelembagaan, Nirmala Puspita Dewi membuka kegiatan tersebut yang diikuti oleh perwakilan Dinas Peternakan kabupaten/kota se-Sumbar.

Nirmala menyebutkan, kegiatan tersebut juga diikuti oleh 7 Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP) kabupaten/kota se-Sumbar.

Disebutkan Nirmala, dalam pertemuan ini DPKH Sumbar mencoba menggali potensi investasi peternakan yang ada di kabupaten/kota di Sumbar dengan mensinergikan data-data yang ada.

Lebih jauh disebutkan, dari data - data yang sudah terintegrasi tersebut dari kabupaten/kota maka akan semakin terlihat peluang investasi peternakan yang ada di Sumbar.

Menurutnya, data peluang investasi peternakan tersebut bisa lebih detail dan komprehensif disajikan. Dengan demikian akan membuat para calon investor pun bisa semakin berminat untuk berinvestasi di Sumbar.

"Kegiatan ini sebagai salah satu upaya yang kita lakukan DPKH pada bidang Bina Usaha dan Kelembagaan dalam mengembangkan usaha peternakan di Sumbar," jelas Nirmala.

Pada tempat yang sama, Ketua Tim Kerja Investasi pada Direktorat Pengolahan dan Pemasaran Hasil Peternakan Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan - Kementerian Pertanian RI Idha Susanti mengatakan, Pemerintah RI terus berupaya melakukan peningkatan nilai tambah, penguatan nilai daya saing dan pemasaran hasil peternakan melalui Permentan No.25 Tahun 2023.

Tujuannya, pemberdayaan peternak dan pelaku usaha, kemudahan menjalankan usaha, mandiri dan berkembang serta meningkatkan kesejahteraan.

Lalu, pada tempat yang sama Ketua tim potensi dan peluang investasi DPMPSTP Sumbar, Dr.Egy Juniardi menjelaskan, Sumbar memiliki komoditi unggulan namun belum tergarap secara maksimal seperti perkebunan untuk jenis sawit, perikanan jenis udang, peternakan jenis sapi dan ayam, pariwisata di pulau Mandeh.

Ditambahkannya, lapangan usaha unggulan menurut kabupaten/kota di Sumbar untuk jenis pertanian, perikanan, kehutanan berada di kabupaten Mentawai, Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Tanah Datar, Limapuluh Kota, Solok Selatan, Pasaman Barat, Pasaman. (103)



WORKSHOP - DPKH Sumbar tengah menggali dan mengintegrasikan data kabupaten/kota melalui kegiatan workshop peluang investasi sektor peternakan yang digelar oleh Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (DPKH) Sumbar, Selasa (25/6). (f.e.syawaldi)